

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI
KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh
Ayyub Siswanto
E12110006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul :

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KONFLIK
ANTAR KELOMPOK DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU
UTARA**

Yang dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana-S1 pada Jurusan Ilmu politik dan Ilmu Pemerintahan Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau dipublikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Hasanuddin maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Makassar, Maret 2014

Ayyub Siswanto
NIM E 121 10 006

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ayyub Siswanto

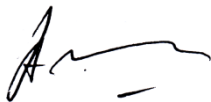
E12110006

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal 26 Februari 2014

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. A. Gau Kadir. MA.
NIP. 1950101798003 1 00 2

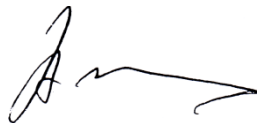
Pembimbing II



Dr. Hj. Rabina Yunus. M.si
NIP. 19601123198603 2 00 1

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan/Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. Gau Kadir. MA.
NIP. 1950101798003 1 002

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KONFLIK
ANTAR KELOMPOK DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU
UTARA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Ayyub Siswanto
E 121 10 006

Telah diperbaiki
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
program studi ilmu pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014

Menyetujui :

PANITIA UJIAN:

Ketua	: Dr. H. A. Gau Kadir, MA	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.ip. M.si	(.....)
Anggota	: Dr. H. Rasyid Thaha. M.si	(.....)
Anggota	: Drs. A. M. Rusli, M.si	(.....)
Anggota	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. A. Gau Kadir, MA	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Rabina Yunus, M.si	(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU

Tidak ada kata yang mengalahkan rasa syukur penulis kepada sang maha segalanya, Allah SWT, terima kasih telah memberikan penulis sedikit nikmat, waktu dan semangat untuk membuat skripsi ini yang dalam prosesnya Engkau memberikan suka dan duka yang tidak akan pernah dilupakan dan akan selalu disyukuri.

Sampai pada titik ini, penulis diberi kesempatan untuk memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang-orang yang sadar dan tanpa sadar telah ada dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, untuk itu pada

1. Kepada bapak Alm. Rahman dan ibunda Rabiah serta bapak Muh. Taufik dan ibu Nani, terima kasih atas segala limpahan kasih dan sayangmu selama ini, membesarkan, membimbing penulis hingga sampai saat ini, berkat doa-doamu sehingga anakmu sampai sekarang bisa seperti ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya dan memberikan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi bapak dan ibu.

2. Saudara-saudaraku Uncha Rahman, Kurniati Rahman s.pd, Ramadhan S.sos, Suliana, Erni Rahman S.pd, dan Yayan Ade Wahyudi yang telah menjadi lumbung kasih sayang penulis yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang serta dorongan moril dan materi. Kalian akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di dalamnya.
3. Semua sanak keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materi. Buat Mastam SP beserta Rahmatia SP. M.si yang telah menjadi orang tua penulis selama perantauan, maaf jika selama ini banyak merepotkan. Buat sepupu-sepupuku terimah kasih telah memberikan arti besar tentang sebuah ikatan darah.
4. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, BO. FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, M.A selaku ketua jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, M.A selaku *Pembimbing I*, dan Dr. Hj. Rabina Yunus. M.si selaku *Pembimbing II* yang telah membantu,

membimbing dan memberi dorongan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS yang tanpa pamrih mendidik dan mengajarkan banyak hal, memberikan berbagai hal, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis. Semoga menjadi amal jariyah disisi-Nya. Kepada seluruh staf pegawai FISIP UNHAS, terima kasih atas pelayanan yang diberikan demi kelancaran administrasi dan perkuliahan.
9. Kepada seluruh Pemerintah Kecamatan Sabbang beserta kepolisian Kecamatan Sabbang. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
10. Segenap keluarga kecil “Bumi Orange” (HIMAPEM FISIP UNHAS). Renaissance (07), Glasnost (08), Aufklarung (09), Volksgeist (10), Enlightenment (11), Fraternity (12), Lebensraum (13). Terima kasih telah memberikan warna dan cerita tentang arti kebersamaan.
11. Segenap keluarga kecilku, saudara satu perjuangan VOLKSGEIST 2010. Anugrah Rachmat (selaku Ketua Angkatan), Kurniawan Akbar, Ahmad Yulisar BN, Rian Hidayat, Muh. Reza Syamsuri, Novri Ardiwiranata, Nazruddin, Bondan Arizona, Ahmad Aksan Haris, Achmad Akmal M, Ismail H Mawi, Muh. Wahyu Tarman, Sambolangi, Muh. Wahyu Arvansyah, A. Samsul Rijal, Tasbih Fajri, Khasbi

Syuriansyah, Firman, Surya Arisman, Muh. Yusuf, Rimba, Wandu Harmawan, Harri Agustaf, Amal, Muh. Ikram, Adam Amin Bahar, Darmawan Saputra, Alfiani Eka Sari, Evi Mulyasari Akmul, Nurul Fibrianti, Neli Sari, Reski Sri Ramadhani, A. Megie Senna, Ika Monika, A. Ilmi Utami Irwan, Widyani Permatasari, Nana Listiana, A. Yenni Yuniarti, Metalia Intan, Tanti Prastuti, Novianti, Dian Riska, A. Riska sardi, Hastutiyan Hadi, Nurkumala Sari, A. Nurhidayah, dan Dina Astuti. Terima kasih telah memberikan arti kebersamaan dan arti persaudaraan yang telah kalian berikan. Kelak kita akan selalu bersama dan sukses bersama.

12. Teman-teman KKN Gelombang 85 Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu. Kak Rahmad, Kak Ridwan, Muh. Afandi Lasaripi, Dwiyantri L, Ririn Purwaningrum, Rizal, Rahmat Wiwin, Upe. Terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis, kalian tetap Luar Biasa.

13. Para sahabat yang telah banyak membantu, memberi semangat, dorongan, motivasi selama ini. Terima kasih atas semuanya, kalian akan tetap menjadi sahabat yang luar biasa buat penulis.

14. Seluruh mahasiswa FISIP UNHAS.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang maha pemurah Melimpahkan pahala yang berlipat Ganda bagi semua

pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Februari 2014

Penulis

Ayyub Siswanto

INTISARI

Ayyub Siswanto. NIM. E 121 10 006. Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Dibawah bimbingan Dr. H. A. gau Kadir. MA. Dan Dr. Hj. Rabina Yunus. M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Posisi dan Peran Pemerintah Kecamatan Sabbang Bekerja sama dengan pemerintah Desa Buangin dan desa Dandang dalam mengatasi Konflik antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membedakan satu sama lainnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik antar kelompok pemuda tersebut sedikit demi sedikit.

Dari penelitian tersebut didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam menangani masalah konflik antar kelompok pemuda tersebut.

Abstrack

Ayyub Siswanto. NIM. E 121 10 006. Role of Local Government in Overcoming Conflict Between Group In District Sabbang North Luwu. Under the guidance of Dr. H. A. gau Kadir. MA. And Dr. Hj. Rabina Yunus. M.Si.

Nowadays, in the research purpose to determine or understand how-to-know the position and role of the district government Sabbang working-together with the village government and village Buangin Dandang in resolving inter-group conflict in the District of North Luwu Sabbang.

Otherwise, the research to do with way collecting several data research literature, with the observation, conversation within aim and research documentary the old literature. In the finally, research have which is the role sub-district Sabbang and sub-district Buangin and district of Dandang have been running-well which is inside the role constant with job-positions and functions from the groups each others that take-over in the wisdom. Even though, the government still has weakness but, all of functions that government has done with neutral without discriminate each others.

Therefore, the solving conflict between youth's Buangin and youth's Dandang government sub-district as along as government village's doing mediation that all of the problems to reach the peace each other. And take-over government which have been role's facilities that overcome the conflict between youth's step-to-step.

From the research have been got several the effort government did. And mean's of government district and district of village the way solving problems between youth's each other.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENERIMAAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori.....	7
1. Teori Peranan.....	7
2. Teori Konflik.....	9
3. Teori Resolusi Konflik.....	15
2.2. Pengertian.....	17
1. Pengertian Peranan.....	17
2. Pengertian Konflik.....	21
2.3. Kerangka Konsep.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Lokasi Penelitian.....	27
3.2. Populasi Dan sampel.....	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4. Definisi Operasional.....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Profil Daerah Penelitian.....	32
A. Kecamatan Sabbang.....	32

B. Desa Buangin.....	36
C. Desa Dandang.....	46
4.2. Karakteristik Responden.....	56
4.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Antar Kelompok pemuda Di Desa Buangin Dan Desa Dandang.....	60
4.4. Upayah Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Mengatasi konflik antar kelompok.....	72
4.5. Peranan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik antar kelompok.....	78
4.6. Frekuensi Terjadinya Konflik.....	83
4.7. Faktor penghambat.....	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV. I Pembagian Lahan di Desa Buangin.....	39
Tabel IV. II Jumlah Penduduk Setiap Dusun di Desa Buangin.....	41
Tabel IV. III Tingkat Pendidikan di Desa Buangin.....	42
Tabel IV. IV Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Buangin.....	44
Tabel IV. V Sarana dan Prasarana di Desa Buangin.....	46
Tabel IV. VI Pembagian Lahan di Desa Buangin.....	49
Tabel IV. VII Jumlah Penduduk Setiap Dusun di Desa Dandang.....	52
Tabel IV. VIII Tingkat Pendidikan di Desa Dandang.....	53
Tabel IV. IX Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Dandang.....	55
Tabel IV. X Sarana dan Prasarana di Desa Dandang.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat di selesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan hidup bangsa akan mengalami pemunduran apabila generasi muda yang berkonflik dibiarkan berlanjut. Maka hal itu bertentangan dengan asumsi yang biasa dikatakan oleh para generasi sebelumnya bahwa pemuda adalah pelopor perubahan dan sebagai generasi pelanjut yang akan memegang peranan yang urgen dalam setiap kehidupan masyarakat.

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin

menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan

indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher, et.al., 2001).

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, konflik antar kelompok sering kali terjadi dimana-mana. Konflik horizontal yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Sebut saja daerah yang sering terlibat konflik antaranya Desa Buangin dan Desa Dandang yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara..

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar pemuda yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut

tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Konflik antar kelompok yang terjadi di Desa Buangin dan Desa dandang ini sangat begitu memprihatinkan, karena konflik ini sudah begitu lama, akan tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini. Terbukti perkelahian antar pemuda desa tersebut sering kali terjadi. Seharusnya pemerintah setempat lebih serius dalam menangani kasus tersebut. Masalahnya setiap konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan banyak kerugian.

Peran pemerintah dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap peranan pemerintah terhadap Konflik yang terjadi antara Desa Buangin dan Desa Dandang. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :**“Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi pemicu terjadinya Konflik antara Desa Buagin dan Desa Dandang ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di Desa Buangin dan Desa Dandang di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara kelompok Desa Buangin dan Desa Dandang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di Desa Buangin dan Desa Dandang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan Sabbang bekerja sama dengan pemerintah Desa yang berkonflik dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam bentuk perkelahian antar kelompok. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok pemuda tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini kekerasan yang berujung konflik.

2. Manfaat metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah dan penanganan kekerasan yang berujung konflik di dalam lingkup masyarakat.

3. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik dalam bentuk perkelahian antar kelompok pemuda yang kerap terjadi. Terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan sabbang beserta pemerintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik antar kelompok pemuda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori Peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung pada lingkungan sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola peranan yang saling berhubungan

2. Teori Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik

adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam

masyarakat. Teori konflik yang terkenal adalah teori yang disampaikan oleh Karl Mark, bagi Mark konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan. Teori konflik Mark yang terkenal adalah teori konflik kelas dimana dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kaum borjuis selalu mengeksploitasi kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus pada akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial.

Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam sosiologi adalah teori yang disampaikan oleh Lewis A. Coser. Coser berusaha merangkum dua perspektif yang berbeda dalam sosiologi yaitu teori fungsionalis dan teori konflik. Pada intinya coser beranggapan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Ketika konflik berlangsung Coser melihat katup penyelamat dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan.

Katub penyelamat adalah mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katub penyelamat merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sistem atau struktur sosial. Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik

dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang disebabkan tuntutan khusus yang dilakukan oleh partisipan terhadap objek yang dianggap mengecewakan.. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan khusus, melainkan untuk meredakan ketegangan salah satu pihak.

Teori konflik lainnya adalah Ralp Dahrendorf, teori dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori konflik Mark. Karl Mark berpendapat bahwa kontrol sarana produksi berada dalam satu individu yang sama. Dahrendorf menolah asumsi ini dengan alasan telah terjadi perubahan drastis dalam masyarakat, yaitu antara masa dimana Mark menyampaikan teorinya dengan masa Dahrendorf.

Munculnya dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan timbulnya kelas menengah baru merupakan dasar dari teori Dahrendorf. Dekomposisi modal ditandai dengan munculnya korporasi dengan saham yang dikontrol orang banyak. Dekomposisi tenaga kerja adalah munculnya orang ahli yang mengendalikan suatu perusahaan. Timbulnya kelas menengah baru dari buruh terampil dalam suatu perusahaan yang dibawahnya terdapat buruh biasa dengan gaji rendah.

Dalam perkembangannya teori konflik dibahas lebih spesifik dengan lahirnya cabang baru sosiologi yang membahas tentang konflik yaitu sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik diungkapkan oleh George Simmel tahun 1903 dalam artikelnya *The Sociology of conflict*. George simmel

kemudian dikenal sebagai bapak dari sosiologi konflik. Dalam tulisan berikutnya akan dibahas beberapa tokoh dan pandangannya mengenai teori konflik seperti Max Weber, Emile Durkheim, Ibnu Khaldun dan George Simmel, teori Karl Marx tidak akan dibahas disini karena telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya.

Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun *tribal*. Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik (Novri Susan 2009:34). Dari sini dapat kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan kekuasaan.

Max Weber berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya (Novri Susan 2009:42).

Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting *power* (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. *Power* (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan *power* (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial

sehingga menciptakan dinamika konflik. Emilie Durkheim dalam salah satu teorinya gerakan sosial menyebutkan kesadaran kolektif yang mengikat individu-individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Kesadaran kolektif ini merupakan unsur mendasar dari terjaganya eksistensi kelompok. Anggota kelompok ini bisa menciptakan bunuh diri altruistik untuk membela eksistensi kelompoknya (Novri Susan 2009:45). Walaupun tidak secara tersirat membahas teori konflik namun teori Weber ini pada dasarnya berusaha untuk menganalisa gerakan sosial dan konflik. Gerakan sosial bagi Weber dapat memunculkan konflik seperti yang terjadi pada masa Revolusi Prancis.

George Simmel berangkat dari asumsinya yang bersifat realis dan interaksionalis. Bagi simmel ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi (individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu kelompok). Simmel menyatakan bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab konflik.

Simmel berargumen ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal (Novri Susan 2009:48). Permusuhan timbal balik tersebut

mengakibatkan terbentuk stratifikasi dan divisi-divisi sosial, yang pada akhirnya akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial.

3. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Menurut Johan Galtung (2007: 93) ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu :

1. Peacekeeping

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. Peacemaking

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

3. Peacebuilding

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Adapun peranan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya Konflik yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar publik.
2. Optimalisasi pelayanan publik.

3. Penataan kota yang berkeadilan.
4. Pengektifan fasilitas umum.
5. Pembinaan organisasi berbasis etnis.
6. Pengupayaan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
7. Penegakan hukum yang berkeadilan.
8. Manajerial pengelolaan perijinan aktivitas politik.
9. Mengupayakan pemenuhan lapangan kerja.
10. Melibatkan tokoh masyarakat sebagai 'kepanjangan tangan' pemerintah untuk melakukan penyuluhan.
11. Memperkuat basis keagamaan sebagai bagian dari proteksi dari radikalisasi.
12. Mengoptimalkan pendidikan bela Negara.
13. Optimalisasi program-program keserasian nasional.
14. Mengektifkan program-program untuk meminimalisir konflik dan kerawanan sosial dengan pendekatan kearifan lokal.

2.2. Pengertian

1. Pengertian Peranan

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau

peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut. Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut : Peran yakni laku; hal berlaku atau bertindak, pemeran, pelaku, pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan.

Dalam kamus sosiologi, disebutkan bahwa peranan adalah : 1.) Aspek dinamis dari kedudukan, 2.) Perangkat hak-hak dan kewajiban, 3.) Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan 4.) Bagian dari seseorang yang mempunyai bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang. Sedangkan Horton dan Hubt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahkan dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai perangkat peran. Istilah seperangkat peran (Role Set) digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peranyang saling berhubungan dan cocok.

Menurut Selo Sumarjono, Peran (Role) adalah aspek dinamis dari kehidupan (Status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan social seseorang, antara status dan role sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan.

Sedangkan menurut Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka diamenjalankan suatu peran.

Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran,. Karena perran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah persn harus dijalankan sesuai dengannorma-norma yang berlaku juga dimasyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Sedangkan menurut pengertian dalam kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara, maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang peran diantaranya sebagai berikut :

- a. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan denagn posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti

merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi perilaku struktur social.

Pengertian peranan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.L.S. Poerwadarminta (2000:366), mengemukakan bahwa pengertian peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.

Sedangkan dalam kamus istilah Antropologi mengartikan peranan sebagai perilaku pemain sandiwaranya yang mempersonifikasikan sesuatu watak manusia tertentu.

Sementara itu pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:2003) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Konsep tentang peran (Role) menurut Komaruddin (1994:768) dalam buku "Ensiklopedia Manajemen" mengungkapkan sbagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian peran yang dipaparkan komaruddin dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah dalam pembangunan sangat luas mengingat peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang efisien, efektif, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan penting artinya karena dapat mengatur perilaku seseorang dimana pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian orang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain atau sekitarnya. Jadi peranan yang dimaksud peneliti adalah bagaimana peranan pemerintah atau birokrasi pemerintahan di dalam mengambil keputusan.

2. Pengertian Konflik

Pribadi maupun kelompok yang menyadari adanya perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola

prilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (konflik). Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (kamus sosiologi, 1985 : 85).

Konflik merupakan bentuk integrasi dimana tempat ,waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana isi segitiga yang dapat berubah. Coser mengambil pembahasan dari simmel, mengembangkan proposisi dan memperluas konsep simmel tersebut dalam menggambarkan kondisi-kondisi dimana konflik secara positif membantu struktur sosial dan terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Coser membahas ahli teori (bangsa amerika) yang lebih awal, menyatakan pemahaman mereka tentang sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat. Albion small dan george E. vincer sebagai pengarang terkenal buku teks pertama sosiologi amerika, misalnya mencerminkan orientasi pembaharuan sosiologi ketika menulis, sosiologi dilahirkan dalam semangat modern untuk memperbaiki masyarakat (*margaret M. poloma 1994 : 107*).

Konflik sosial yang menjadi objek sosiologi harus benar-benar merupakan fakta sosial, sungguh terjadi dan dapat di observasi. Itu berarti ada dua pihak bukan hanya satu pihak yang terlibat dalam konflik, dan masing-masing mau menghancurkan lawan atau membuatnya tak berdaya.

Akibat lain ialah terhentinya kerja sama antara kedua belah pihak yang terlibat konflik. Masa antarah pecahnya konflik dan terbentuknya kerjasama kembali disebut masa permusuhan. Dalam masa ini usaha kooperatif tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses kemajuan masyarakat mengalami kemacetan.

Apabila konflik terjadi di suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, konflik juga menghambat persatuan bangsa serta interaksi sosial dan nasional. (Drs. D. Henruspito OC, 1989 : 248).

Akan tetapi para ahli sosiologi kontemporer sering mengacukan analisa konflik sosial, secara implisit melihatnya sebagai destruktif atau patologis bagi kelompok sosial. Coser memilih menunjukkan berbagai sumbuhan konflik yang secara potensial positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur. Dia melakukan hal ini dengan membangun diatas sosiologi klasik pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konflik sosiologi Jerman yang terkenal yaitu George Simmel. Jelaslah bagi Coser maupun kaum fungsionalisme struktural, struktur sosial ada di dalam dirinya sendiri dan bergerak melalui kendala. Coser mengungkapkan hal itu sebagai berikut : “sosiologi konflik harus mencari nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang tertanam secara struktural sehingga membuat manusia saling terlibat dalam konflik, bilamana ia tidak ingin dilarutkan kedalam penjelasan psikologis mengenai agresivitas bawaan, dosa turunan, atau kebengalan manusia. Apa yang disumbangkan Coser kepada orientasi

fungsionalisme ialah deskripsi mengenai bagaimana struktur-struktur sosial itu dapat merupakan produk konflik dan bagaimana mereka mempertahankan oleh konflik. Prosesnya sebagian besar berkisar di seputar intensitas dan fungsi konflik bagi lembaga-lembaga sosial. Walaupun Coser terikat pada kesatuan teori masyarakat yang ilmiah, tetapi ia menolak setiap gerakan ke arah naturalisme atau determinisme yang ekstrim pada setiap tindakan manusia (*Margaret M. Polman, 1994 : 125*).

Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain, dan mereka tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan-kesimpulan yang berbeda-beda, dan apabila mereka cenderung bersifat toleran, maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tertentu. Berdasarkan risalah konflik (dari Simmel) sebagai bentuk dari asosiasi, Coser membentangkan proporsi untuk menguji fungsionalisme konflik bagi kelompok sosial. (*Margaret M. Polman, 1994 : 127*).

Tentang fungsi pertikaian, Ritzer dengan mengutip Berghe, melukiskan sebagai berikut :

1. Berbagai alat untuk memelihara solidaritas.
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.

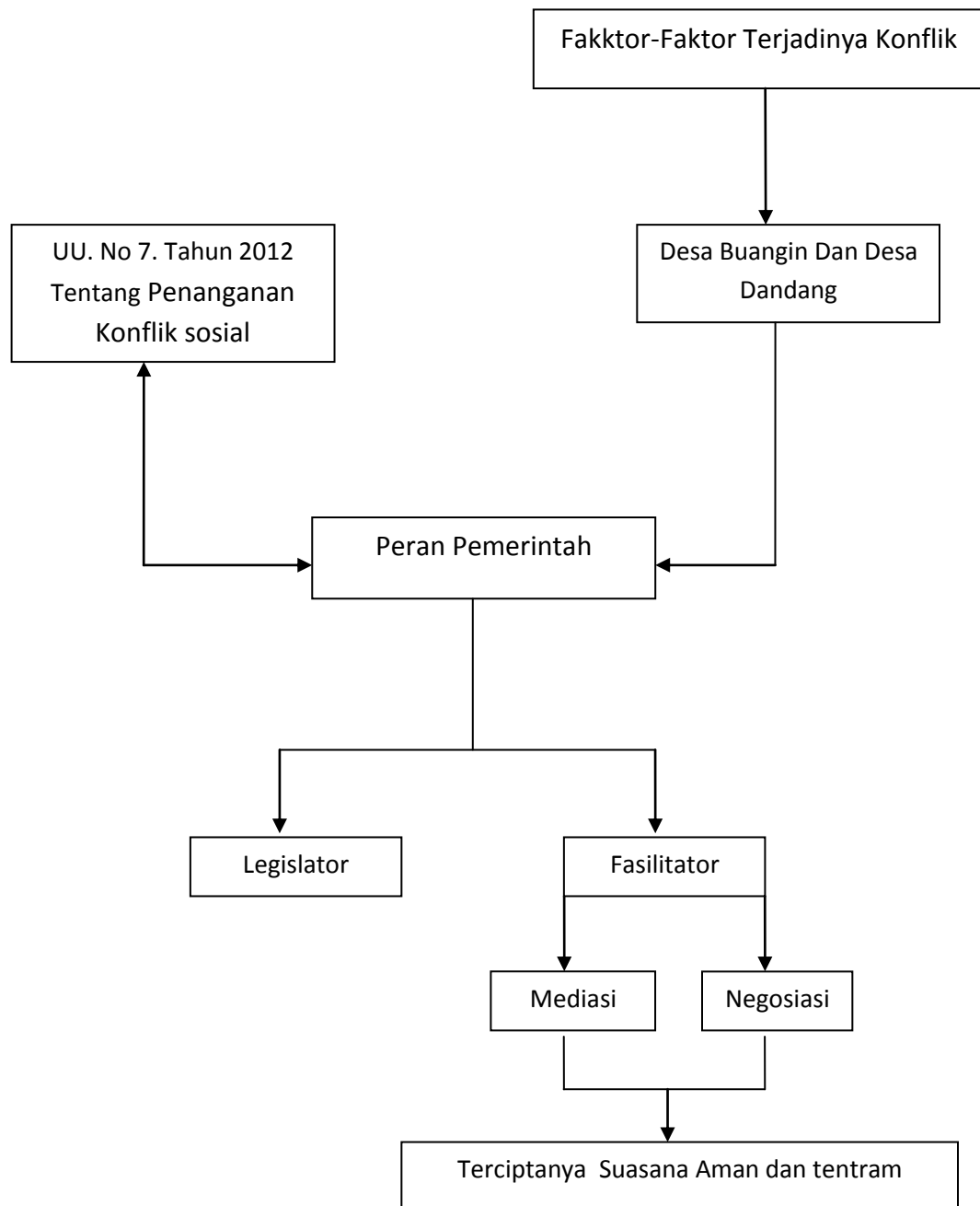
4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tetapi dengan adanya konflik posisi dan batas antara kelompok tahu secara pasti diman mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak lebih cepat. (taneko,1994 : 74).

Konflik dapat merupakan proses yang instrumental dalam pembentukan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dengan kelompok lain dapat garis batas antara dua atau lebih kelompok dan melindunginya agar tidak lebur dalam dunia sosial sekelilingnya. (Margaret M. Polman,1994 : 108).

Intensitas konflik dalam suatu sistem dapat ditelaah dengan cara memusatkan perhatian hubungan timbal balik antara variabel-variabel :

- a. Keterlibatan emosional para partisipan.
- b. Keterlibatan struktur sosial.
- c. Taraf realisme dari konflik..
- d. Taraf obyektivitas diatas kepentingan-kepentingan pribadi walaupun semua variabel dianggap penting. Coser cenderung memberikan prioritas pada proposisi pertama dan kedua yang dianggapnya menentukan apakah konflik diobjektivisasikan realitas, dan menjangkau nilai-nilai (Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Ratih Iestarni, 1988 : 96).

2.3. Kerangka Konsep



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian berlokasi di wilayah Kabupaten Luwu Utara Desa Buangin dan Desa Dandang Kecamatan Sabbang.

3.2. Populasi dan Sampel

Data yang di peroleh dengan menggunakan *non-probability* sampling yaitu dengan mengambil sampel secara *non-random*, dengan menentukan informan yang diambil dari 2 Desa yaitu informan Desa Buangin dan informan dari Desa Dandang, kemudian informan selanjutnya dari kecamatan Sabbang dan Kepala kepolisian Kecamatan Sabbang yang akan memberikan informasi mengenai peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di kecamatan sabbang kabupaten luwu utara.

Tahap-tahap penarikan sampel:

- Dengan menemui *key informan* (tokoh masyarakat) dalam hal ini adalah kepala Desa Buangin, kepala dusun Desa Buangin, Tokoh Perempuan Desa Buangin, dan Tokoh Pemuda Desa Buangin kemudian kepala Desa Dandang, kepala dusun Desa Dandang, Tokoh Pemuda Desa Dandang, Camat Sabbang,

serta Kepolisian dipilih Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena tokoh masyarakat tersebut dianggap banyak tahu tentang, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik yang terjadi. an.

- Kemudian informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu orang yang dianggap mampu memberikan data atau informasi tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang relevan serta melalui lembaga terkait masalah yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang langsung pada obyek penelitian. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan perkembangan kondisi serta faktor-faktor lain yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Misalnya tingkat validitas dan tingkat kejenuhan data. Pengumpulan data di lapangan dapat dilakukan melalui :

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog atau komunikasi baik secara bebas maupun secara mendalam pada narasumber.
- b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dari dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.4. Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Daerah, yang dimaksud disini adalah pemerintah kecamatan Sabbang.
 - Camat Sabbang beserta stafnya
 - Kepala Desa Buangin beserta Stafnya
 - Kepala Desa Dandang Beserta Stafnya

2. Peran pemerintah yang dimaksud disini adalah Peran pemerintah Kecamatan Sabbang dan pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang.

- Legislator, Pembuat kebijakan
- Fasilitator, Memfasilitasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.

- Mediator, Menjadi Penengah

3. Faktor-faktor terjadinya konflik:

- Faktor Nilai. Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Konflik terjadi karena dua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa yang menjadi objek konflik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah konflik yang bersumber dari perbedaan

rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan.

- Kurangnya Komunikasi. Konflik bisa terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi diantara mereka (Fungsi komunikasi, antara lain adalah mengurangi tingkat ketidak pastian) dapat mengakibatkan konflik.
- Ketidak cocokan peran. Konflik ini bisa terjadi dimana dan kapan saja, asal dalam sebuah organisasi (sosial maupun formal). Ketidak cocokan peran itu terjadi karena dua pihak mempersepsikan secara sangat berbeda peran mereka masing-masing.
- Konflik yang belum terpecahkan. Banyak konflik yang terjadi karena ada konflik diantara dua pihak yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Tidak ada proses “saling memaafkan” dan “saling mengampuni”. Keadaan ini seperti api dalam sekam, yang setiap saat bisa timbul, dan menghasilkan konflik lebih besa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Daerah Penelitian

A. Kecamatan Sabbang

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Sabbang yang terletak di ujung sebelah Barat merupakan pintu gerbang Kabupaten Luwu Utara dari arah Makassar. Dengan luas wilayah sekitar 525,08 Km², kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu di sebelah Barat. Sedangkan batas sebelah Utara adalah Kecamatan Limbong, serta batas sebelah Timur dan Selatan adalah Kecamatan Baebunta. Pemerintahan Kecamatan Sabbang membawahi 20 desa dimana semuanya sudah berstatus desa definitif. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Pararra (99,69 Km²) atau meliputi 18,99 persen luas wilayah Kecamatan Sabbang. Adapun desa yang paling sempit wilayahnya adalah Desa Batu Alang dengan luas wilayah 4,11 Km².

2. Penduduk

Sampai dengan tahun 2013, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sabbang masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 525,08 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 37 224 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 71 orang per Km². Dengan kata lain setiap Km² luas wilayah di Kecamatan Sabbang secara rata-rata hanya

didiami oleh 71 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.400 orang dan jumlah penduduk perempuan 18.824 orang. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 98 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Selain itu laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sabbang dari tahun 2006-2007 adalah sebesar 1,88 persen.

3. Pendidikan

Meskipun jumlah dan sebarannya relatif masih terbatas, namun sarana pendidikan di Kecamatan Sabbang telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SLTA. Sarana pendidikan TK bertambah 2 (dua) dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan). Sarana pendidikan SD tersebar di hampir semua desa, kecuali di Desa Bone Subur, Kampung Baru, dan Salama. Untuk tingkat pendidikan SLTP, sarana pendidikan terdapat di Desa Tete Uri, Buntu Terpedo, Buangin, Dandang, Tulak Tallu, dan Kelurahan Marobo. Adapun sarana pendidikan SLTA terdapat di Desa Marobo, Buangin, dan Tulak Tallu. Dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya jumlah murid TK mengalami penambahan secara signifikan. Pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah murid TK adalah 192 orang sedangkan pada tahun 2006/2007 bertambah menjadi 303 orang. Hal ini diduga berkaitan erat dengan bertambahnya sarana pendidikan TK dari 6 unit menjadi 8 unit pada periode yang sama. Demikian pula halnya pada periode yang sama jumlah

murid untuk tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA juga cenderung meningkat.

4. Kesehatan

Dibidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Sabbang juga masih sangat terbatas. Untuk melayani 20 desa yang ada hanya terdapat 1 unit Puskesmas di Kelurahan Marobo. Selain itu, hanya terdapat 8 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 1 praktek dokter. Adapun tenaga medis yang terdapat di kecamatan ini terdiri dari 1 orang dokter, 14 bidan, 12 bidan desa, 16 dukun bayi terlatih dan 48 dukun bayi belum terlatih.

5. Perumahan dan Lingkungan

Pada satu sisi kondisi kesehatan lingkungan di Kecamatan Sabbang relatif sudah baik. Dimana sebagian besar warga di 14 desa sudah memiliki jamban sendiri dan hanya 6 desa yang sebagian besar warganya masih belum memiliki jamban. Akan tetapi disisi lain, kondisi saluran pembuangan limbah cair dari rumah tangga di 11 desa tidak lancar, 6 desa tidak ada saluran pembuangan limbah cair dan hanya 3 desa dimana saluran pembuangan limbah cairnya lancar.

6. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Sabbang terdapat fasilitas tempat ibadah berupa Masjid (65 buah), Mushalah (4 buah), dan Gereja (58 buah). Berkenaan dengan kewajiban zakat dan infak bagi

pemeluk agama Islam, pada tahun 2007 di Kecamatan Sabbang terkumpul zakat sebanyak Rp. 157 929 000 dan infak Rp 18 560 000,

7. Pertanian dan Perkebunan

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Sabbang mempunyai potensi yang besar dibidang pertanian. Pengelolaan sector pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Sabbang. Pada tahun 2007, produksi padi di kecamatan ini mencapai 12.719,92 Ton yang dihasilkan dari lahan seluas 2.838,85 Ha. Selain itu produksi Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar berturut-turut adalah 2.652,60 Ton, 150,10 Ton dan 66,24 Ton. Dari beberapa jenis alat-alat pertanian yang digunakan, alat yang paling banyak digunakan yaitu semprotan (7.733 buah). Jumlah keluarga pertanian yang berusaha di sektor tanaman pangan sebanyak 5.689 keluarga.

8. Peternakan dan Perikanan

Sapi merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sabbang. Pada tahun 2007, populasi Sapi mencapai 960 ekor. Selain itu juga terdapat Kerbau (691 ekor), Kambing (362 ekor) dan Babi (3.030 ekor). Selain itu, jenis unggas yang paling banyak terdapat adalah Ayam Buras dengan populasi mencapai 29.667 ekor.

9. Perdagangan dan Hotel

Kegiatan perdagangan di Kecamatan Sabbang didukung oleh keberadaan toko/warung sebanyak 373 buah dan rumah makan sebanyak 34

buah. Selain itu untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk setempat terdapat 1 unit KUD dan 5 unit koperasi Non-KUD.

10. Transportasi dan Komunikasi

Sarana komunikasi di Kecamatan Sabbang masih sangat terbatas. Untuk melayani keperluan komunikasi penduduk Kecamatan Sabbang hanya terdapat 7 wartel yang tersebar di 4 desa. Selain itu juga belum terdapat Kantor Pos di Kecamatan Sabbang. Kondisi jalan di kecamatan ini relatif masih belum baik. Dari 20 desa yang ada, hanya 6 desa yang sebagian besar permukaannya berupa Aspal. Sementara itu, 7 desa sebagian besar jalannya berupa tanah yang di perkeras dan 7 desa lainnya masih berupa jalan tanah.

B. DESA BUANGIN

1. Letak Geografis Dan Keadaan Alam.

Kecamatan Sabbang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu utara dimana Desa Buangin termasuk dalam wilayahnya. Secara geografis Desa Buangin mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terpedo Jaya
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tete Uri
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dandang
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pararra

Luas wilayah Desa Buangin kurang lebih 3206 ha, yang terdiri atas yaitu :

- ❖ Dusun Tarue
- ❖ Dusun Pondan
- ❖ Dusun Rantepasang
- ❖ Dusun Rantebone
- ❖ Dusun Tobebesuk

Pusat pemerintahan berada di Dusun Tarue yang terletak di jalan provinsi, yang jaraknya dari pemerintahan kurang lebih 8 km, dan jarak dari ibu Kota Kabupaten (Masamba) kurang lebih 18 km arah Utara.

Untuk mencapai daerah ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu tiga sampai tiga setenga jam dari Kota Palopo dan 30 menit dari ibukota kabupaten (Masamba).

Seperti halnya di Desa-Desa lain di Kabupaten Luwu Utara, Desa Buangin termasuk di dalam dataran rendah yang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis suhunya berkisar antara 29C-30C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai mei, sedangkan juli sampai agustus penduduk buangin sebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini tergantung perubahan musim, terutama dalam hal pertanian setempat, kapan

mulainya proses penanaman, pembibitan dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian coklat dan padi sawah.

Keadaan tanah di Desa Buangin memang sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman coklat. Sebagian lagi daerah yang besar cocok untuk persawahan terutama untuk padi, selain itu banyak tanaman-tanaman jangka pendek.

Pembagian lahan desa yang digunakan oleh penduduk di desa Buangin dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. I
Pembagian Lahan Desa Buangin

No	Pembagian lahan desa	Jumlah	Persentase
1	Persawahan	956 Ha	29,9%
2	Perkebunan coklat	1000 Ha	31.2%
3	Bangunan	970 Ha	30.2%
4	perumahan	250 Ha	7.8%
5	Perkuburan umum Bagunan umum	30 Ha	0,1%
	Jumlah	3206	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Buangin Tahun 2013

Perkebunan coklat merupakan pembagian lahan yang paling besar di Desa Buangin yaitu 31.2%, disusul oleh bangunan perumahan 30.2%,kemudian persawahan 29,9% bangunan umum mempergunakan lahan yang paling sempit 0.1%.

Perkebunan coklat umumnya jauh dari pemukiman masyarakat Desa Buangin, dimana perumahan berjejer saling berhadapan dan yang paling mereka usahakan bentuk rumah lebih mengarah kepada bentuk rumah khas bugis luwu. Luas rumah rata-rata 20 x 35 meter, tetapi pada umumnya memiliki halaman yang luas sedangkan dinding rumah sudah ada yang permanen berupa tembok. Ada pula yang semi permanen.

2. Keadaan Penduduk.

A. Sejarah Singkat Desa Buangin.

Desa Buangin adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Desa Buangin adalah Desa yang paling tua yang ada di Kecamatan Sabbang. Desa ini adalah desa yang memiliki penduduk paling banyak di Kecamatan Sabbang, jumlah penduduknya sebanyak 4067 jiwa. Dan memiliki lahan yang sangat luas 3206 ha.

B. Jumlah Penduduk

Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 4183 jiwa terdiri dari 2119 jiwa penduduk adalah laki-laki dan 2064 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding penduduk perempuan, dan jumlah itu terdapat 1124 kepala keluarga. Secara terperinci jumlah penduduk penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini :

Tabel IV. II
Jumlah Penduduk Setiap Dusun Desa Buangin

Dusun Tarue		Dusun Pondan		Dusun Rante Bone		Dusun Rante Pasang		Dusun To'bebesuk	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
615	609	241	235	689	717	432	374	142	129
1.224 Jiwa		476 Jiwa		1406 Jiwa		806 Jiwa		271 Jiwa	
407 KK		131 KK		331 KK		185 KK		70 KK	

Sumber: Data Potensi Desa Buangin Tahun 2013

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Dusun Rante Bone, kemudian Dusun Tarue, kemudian Dusun Rante Pasang, Kemudian Dusun Pondan, Kemudian Dusun To'bebesuk.

Berdasarkan Tabel Di atas Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Buangin lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, laki-laki berjumlah 2119 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 2064 jiwa.

C. pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual Bangsa yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penduduk Desa Buangin dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang

sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduk yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama). Bila di bandingkan dengan yang buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah memadai terbukti dengan adanya sebuah taman kanak-kanak (TK) dan sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah menengah pertama (SMP) dan sebuah sekolah menengah atas (SMA) walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk desa buangin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. III
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Buangin

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PRASEKOLAH	225 Orang	226 Orang	451 Orang
SD	250 Orang	215 Orang	465 Orang
SMP	250 Orang	215 Orang	320 Orang
SLTA	65 Orang	101 Orang	166 Orang
SARJANA	8 Orang	8 Orang	16 Orang

Sumber: Data Potensi Desa Buangin Tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa sekolah Dasar yang paling tinggi, menyusul sekolah menengah Pertama, kemudian disusul lagi sekolah menengah atas , dan Sarjana untuk selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak

pernah sekolah tapi dapat membaca dalam tahap sederhana atau hanya bisa mengeja bila membaca sebesar, kemudian disusul yang tidak pernah sekolah sebesar, sedangkan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang paling rendah yaitu hanya 83 orang.

Jadi dapat dikatakan bahwa Desa Duangin hampir bebas dari buta aksara karena sebagian masyarakatnya sudah mengerti tentang arti dan manfaat pendidikan. Ini dapat dibuktikan banyaknya jumlah penduduk yang sekolah di desa tersebut (SD dan SMP . SMA) maupun yang melanjutkan sekolah mereka di Palopo (STIKES Kamanre, STAIN, Cokro Aminoto, dan Universitas A. Jemma) ada juga yang sampai di Makasar untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi (UNHAS, Universitas 45, UMI, UVRI).

D. Mata Pencaharian Hidup.

Pada umumnya Desa Buangin di bawah wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bagian pertanian termasuk pula halnya pada penduduk Sulawesi selatan. Teknik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada juga yang sudah modernisasi. Pada desa Buangin perbandingan antara teknologi tradisional adalah 35-65 dalam artian teknologi tradisional mulai ditinggalkan kemudian beralih ke modernisasi.

Begitupun halnya Desa Buangin sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, ini merupakan potensi penduduk jika dikelola dengan baik. Pada sektor pertanian ini terdapat berbagai komoditas atau

konsumsi yang biasa dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka panjang yaitu durian, kelapa, langsung, dan sebagainya. Sedangkan tanaman jangka pendek adalah padi, coklat, dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila dikembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Selain bertani ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wirausaha, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. IV
Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Buangin

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah
1.	PETANI/PEKEBUN	953 Orang
2.	PEDAGANG	70 Orang
3.	PNS	60 Orang
4.	BURUH	-

Sumber : Data Potensi Desa Buangin Tahun 2013

Terlihat bahwa data ada pada tabel menunjukkan bahwa petani yang paling banyak, dari jumlah penduduk secara keseluruhan, disusul yang bergerak sebagai pedagang, kemudian disusul yang bergerak di bidang jasa/wiraswasta kemudian pegawai negeri, dengan melihat tabel di atas 50% penduduk Desa Buangin memiliki pekerjaan sebagai petani kemudian

setengahnya lagi bergerak di bidang lain, seperti sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan lain.

E. Sarana Dan Prasarana.

Saran dan prasarana yang ada di Desa Buangin dapat dikatakan sudah cukup memadai, dimana desa ini terletak di jalan poros provinsi yang telah di aspal hanya jalan yang menuju rante bone dan dusun rantepasang yang belum di aspal. Untuk lebih jelasnya sarana yang dimiliki oleh Desa Buangin dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. V
Sarana Dan Prasana Di Desa Buangin

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah/ boah
1	Pendidikan :	
	a. TK	1
	b. SD Negeri.	1
	c. SMP Swasta.	1
	d. SMA Swasta	1
2	Tempat ibadah.	
	a. Mesjid.	5
	b. Musollah.	1
	c. Gereja katolik.	1
	d. Gereja keristen	8
3	Rumah tempat tinggal :	
	a. Berdinding batu permanen	400
	b. Berdinding batu sebagian	200
	c. Panggung berdinding kayu/papan	59
	d. Berdinding kayu	300
4	Transportasi :	
	a. Truk	6
	b. Sepeda	100
	c. Sepedah motor	500
	d. Angkutan kota/pete-pete	20
5	Komunikasi.	
	a. Tv /parabola	1000
	b. Radio	50
	c. Koran masuk desa	6

Sumber : Data Potesial Desa Buangin Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana sosial yang ada di Desa Buangin dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan Desa Buangin dapat dikatakan baik.

Sarana transportasi di Desa Buangin sudah sangat baik. Ini menandakan bahwa penduduk Desa Buangin bisa di golongan sudah

sejahtera, sedangkan sarana komunikasi penduduk Desa Buangin tidak mau ketinggalan dengan berita yang sedang terjadi. Mereka menambah pengetahuan dan memperoleh berita dari siaran radio dan siaran tv yang mereka miliki.

C. DESA DANDANG

1. Letak Geografis Dan Keadaan Alam

Kecamatan Sabbang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara dimana Desa Dandang termasuk dalam wilayahnya.

Secara geografis Desa Dandang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru,
- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Desa Buangin,
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan desa Buangin,
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan desa Pararra

Luas desa dandang kurang lebih 23 (Km), yang terdiri dari Lima Dusun yaitu :

- ❖ Dusun Dandang I
- ❖ Dusun Dandang II
- ❖ Dusun Salu Karondang
- ❖ Dusun Salipo
- ❖ Dusun Panggalli

Pusat pemerintahan berada pada Dusun Dandang I, yg terletak di jalan poros provinsi, yang jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan

kurang lebih 10 km, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara (Masamba) kurang lebih 20 km arah Utara.

Untuk mencapai desa ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat di tempuh dalam waktu dua sampai dua setengah jam dari Kota Palopo dan tiga puluh menit dari Kota Kabupaten (Masamba)

Seperti halnya desa-desa lain Kabupaten Luwu Utara, Desa Dandang termasuk didalam Desa daratan rendah yang memang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis dan suhunya 29C-33C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai mei , sedangkan juli sampai agustus penduduk dandang menyebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini sangat tergantung pada perubahan musim, terutama pada hal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan, dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian jenis coklat dan padi. Keadan tanah di Desa Dandang memang sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman coklat. Sebagian lagi daerah yang agak basah cocok untuk persawahan terutama untuk padi., selain itu banyak tanaman-tanaman jangka pendek. Pembagian lahan desa yang digunaka oleh penduduk Desa Dandang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. VI
Pembagian Lahan Desa Dandang

No	Pembagian lahan desa	Jumlah	Persentase
1	Persawahan	314 ha	49,60
2	Perkebunan coklat	200 ha	31,60
3	Perkuburan umum	3 ha	0,50
4	Bangunan perumahan	99 ha	15,60
5	Bangunan umum	2 ha	0,31
6	Lain-lain	15 ha	2,36
	Jumlah	633 ha	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Dandang Tahun 2013

Persawahan merupakan pembagian lahan Desa yang paling besar di Desa Dandang yaitu 49,63%, disusul oleh perkebunan coklat yaitu 31,60%. Bangunan umum mempergunakan lahan paling sedikit yaitu 0,31%, kemudian perkebunan umum 0,50%, lain-lain 2,36% dan bangunan perumahan 15,63%.

Perumahan penduduk umumnya menghadap ke jalan raya kejalan poros utamanya berada pada Dusun Dandang dan Dusun Salu Karondang dimana perumahan berjejer saling berhadapan dan yang paling di mereka usahakan bentuk rumah lebih mengarah kepada bentuk rumah khas Bugis Luwu. Luas rumah rata-rata 20 x 35 meter, tetapi pada umumnya memiliki halaman yang luas. Sedangkan dinding rumah sudah ada yang permanen berupa tembok, ada pula yang semi permanen.

2. Keadaan Penduduk

A. Sejarah singkat Desa Dandang

Desa Dandang yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ,desa ini dahulu termasuk kedalam wilayah Desa Buangin, tetapi sekitar tahun 1994 terpecah menjadi sebuah Desa yang di kepalai oleh H.Abd. Hamid , tahun 1998-2002 dikepalai oleh H.Abd. Hamid ,I, dan 2002-di epalai lindu.

Dahulu desa ini perna jadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII, yang pada saat itu masih berupa hutan belantara,daerah ini terakhir di kuasai sekitar 1964 dan gerombolan itu pun bergerak keluar dari hutan menuju Kota Palopo. Pada saat keluar gerombolan dari daerah itu, masyarakat setempat baru mulai merintis dan membuka lahan pertanian dan perkebunan di daerah hutan belantara tersebut.

Selang satu tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1965, tibalah pendatang dari suku toraja baik yang langsung dari toraja sampai pada pendatang yang sudah lama menetap di palopo sebelumnya. Karena mendapat kabar banyak lahan yang tersedia di dandang yang belum di manfaatkan, maka mereka pun berangkat kedesa tersebut walaupun hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja. Pada saat kedatangan mereka masih bernama desa buangin dan diterima oleh kepala desa pada saat itu, H. Abd. Hamid.

Jadi dapat di katakan, bersamaan dengan pembukaan lahan yang dilakukan oleh penduduk asli, pendatang tiba di Desa Dandang, meskipun pada saat itu ada persawahan tetapi dalam jumlah yang kecil. Selain itu

masih banyak tanah yang masih berupa hutan dan dan tanpa pemilik dan akhirnya dibagi-bagikan kepada pendatang tetapi ada sebagian kecil yang tetap mereka beli.

B. Jumlah penduduk

Desa ini memiliki penduduk sebanyak 1951 jiwa terdiri dari 976 jiwa penduduknya adalah laki-laki dan 975 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dapat di katakan hampir seimbang dan jumlah itu terdapat 390 kepala keluarga. Secara terperinci penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. VII
Jumlah Penduduk Setiap Dusun Di Desa Dandang

Dusun Salu Karondang		Dusun Dandang I		Dusun Pangngalli		Dusun Salipo		Dusun Dandang II	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
246	242	190	201	244	166	199	214	196	410
487 Jiwa		391 Jiwa		410 Jiwa		404 Jiwa		410 Jiwa	
116 KK		104 KK		94 KK		99 KK		102 KK	

Sumber: DataPotensi Desa Dandang Tahun 2013

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Dusu Salukarondang, Dusun Pangngalli dan Dusun Dandang II, kemudian Dusun Salipo, Kemudian Dusun Dandang I.

Berdasarkan Tabel Di atas Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Dandang lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, laki-laki berjumlah 1074 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1025 jiwa.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual bangsa yang pada akhirnya akan membentuk keperibadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup.

Penduduk Desa Dandang dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama) bila dibandingkan dengan buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk desa dandang dapat di lihat tabel berikut ini :

Tabel IV. VII
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Dandang

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PRASEKOLAH	105 Orang	95 Orang	200 Orang
SD	165 Orang	158 Orang	323 Orang
SMP	35 Orang	40 Orang	75 Orang
SLTA	20 Orang	15 Orang	35 Orang
SARJANA	25Orang	49 Orang	49 Orang

sumber : Data Potensi Desa Dandang Tahun 2013

Dari tabel di atas bahwa tingkat sekolah dasar (SD) yang terbanyak, menyusul tingkat pendidikan menenga pertama (SLTP), kemudian Tingkat Sekolah Tingkat lanjutan Atas. sedangkan yang tidak pernah sekolah adalah orang-orang yang tidak pernah sekolah tapi dapat membaca dan menulis meskipun dalam tahap sederhana atau hanya dapat mengeja bila membaca. Jadi dapat dikatakan Desa Dandang hampir bebas dari buta aksara karena sebagian besar masyarakat telah mengerti tentang arti dan manfaat pendidikan. Ini dapat dibuktikan banyaknya jumlah penduduk yang bersekolah di Desa tersebut (SD atau SLTP), maupun yang bersekolah di Kota Palopo (STKIP, STAIN dan UNAND) ada juga yang sampai di Makassar (UNHAS, UMI, 45). Bahkan ada juga yang sampai ke Pulau Jawa.

Sedangkan untuk pendidikan SMU mereka ada yang ke Palopo maupun ke Masamba (Ibukota Luwu Utara).

D. Mata Pencarian Hidup

Pada umumnya didaerah pedesaan di dalam wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak dibidang pertanian termasuk pula halnya pada penduduk Sulawesi selatan. Teknik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada pula yang telah tersentuh oleh adanya modernisasi. Pada desa Dandang perbandingan antara teknologi tradisional adalah 60-40 dalam artian sekarang lebih dominan menggunakan alat moderen tapi masih ada juga yang masih tradisional.

Begitu halnya Desa Dandang sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan potensi penduduk jika dikelola dengan baik. Pada sektor pertanian ini terdapat jenis komoditi atau konsumsi yang dapat dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek. Contoh tanaman jangka panjang yaitu durian, kelapa, langsung dan rambutan dan sebagainya. Sedangkan jangka pendek adalah padi, coklat dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila dikembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri.

Selain bertani ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wiraswasta, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. IX
Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Dandang

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah
1.	PETANI/PEKEBUN	334 Orang
2.	PEDAGANG	55 Orang
3.	PNS	41 Orang
4.	BURUH	64 Orang

Sumber: Data Potensi Desa Dandang Tahun 2013

Terlihat bahwa data yang ada pada tabel menunjukkan bahwa Sebagian besar mata pencaharian Masyarakat Dandang Adalah Petani/Pekebun. Selebihnya Sebagai Pedagang, PNS, dan Buruh. Banyaknya jumlah petani di Desa Dandang disebabkan jumlah lahan yang tersedia untuk itu memang sangat banyak. Sejak dahulu memang kabupaten luwu terkenal dengan hasil pertanian baik itu padi, coklat maupun aneka buah jangka panjang karena luasnya lahan tersebut sehingga di desa Dandang terdapat 175 ha lahan pertanian, 82 Ha perkebunan dan 5 Ha perikanan darat.

E. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di desa Dandang dapat di katakan sudah cukup memadai, di mana desa ini terletak di jalan poros provinsi yang telah di aspal, hanya jalan yang menuju dusun pangkali masih diaspal kasar. Untuk lebih jelasnya sarana yang di miliki desa dandang dapat terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel IV. X
Sarana Dan Prasarana Di Desa Dandang

No	Jenis sarana/prasarana	Jumlah/buah
1	Pendidikan :	
	a. SD negei	1
	b. SLTP	1
2	Tempat ibadah :	
	a. Mesjid	2
	b. Mosollah	1
	c. Gereja	2
3	Rumah tempat tinggal :	
	a. Berdinding batu permanen	150
	b. Berdinding batu sebagian.	100
	c. Panggung berdinding kayu/papan	115
		33
4	d. Berdinding kayu.	
	Transportasi :	5
	a. Truk	295
	b. Sepeda	60
	c. Sepeda motir	18
5	d. Angkutan pete-pete	
	Komunikasi	276
	a. Tv/parabola	255
	b. Radio	5
	c. Koran masuk desa	

Sumber : Data Potensi Desa Dandang Tahun 2013

Dengan melihat sarana sosial yang ada di Desa Dandang dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan Desa Dandang dapat digolongkan baik.

Sarana pribadi seimbang antara pendatang dan penduduk asli ini menandakan bahwa besarnya toleransi antar umat beragama di desa ini. Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk Desa Dandang tidak mau ketinggalan dengan berita yang terjadi. Mereka menambah pengetahuan dan memperoleh berita-berita melalui siaran radio dan televisi yang mereka miliki.

4.2. Karakteristik Responden

Berbicara mengenai konflik yang terjadi antara Desa Buangin dan Desa Dandang tidaklah semuda yang kita bayangkan. Karena kita berbicara konflik dan bagaimana penanganannya oleh pihak terkait dan ini merupakan pembahasan yang sangat sensitif di mata masyarakat setempat, karena jangan sampai mereka menganggap bahwa penelitian ini hanyalah sebagai mata-mata atau bisa saja dianggap sebagai profokator sehingga muncullah kembali konflik. Namun alhamdulillah dalam hal ini penulis mampu meyakinkan kepada masyarakat atau informan bahwasannya ini hanya sekedar penelitian, tidak ada maksud lain dalam hal ini sebagai profokator seperti anggapan masyarakat sehingga penulis mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah setempat maupun masyarakat yang mana mampu membantu penulis untuk mendapat informasi terkait apa yang penulis teliti.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang berpedoman pada pedoman wawancara yang akan dibahas secara berurutan.

Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan dari Desa Buangin, Desa Dandang, Camat Sabbang, dan Pihak Kepolisian yang ada di Kecamatan Sabbang. Dilanjutkan dengan membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara kelompok pemuda Desa Buangin Dan Desa Dandang. Kemudian membahas mengenai bagaimana peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik yang terjadi antara kelompok pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang.

Informan dalam penelitian ini adalah, diantaranya Kepala Dusun Desa Buangin, Tokoh Pemuda Desa Buangin, Tokoh Perempuan Desa Buangin, dan Kepala Desa Buangin sendiri. Informan dari Desa Dandang diantaranya Kepala Dusun Desa Dandang, Tokoh Pemuda Desa Dandang, dan Kepala Desa Dandang Sendiri. Kemudian Informan selanjutnya yaitu Camat Sabbang. Kemudian informan terakhir dari pihak Kepolisian .

Adapun data dari informan tersebut yaitu sebagai berikut

A. WK

WK adalah seorang Kepala Desa di Desa Buangin. Lahir pada tanggal 12 Maret 1961, tempat tinggal WK di Desa Buangin, WK beragama islam,

pendidikan terakhir SLTA. WK juga seorang PNS (pegawai negeri sipil) sekaligus kepala keluarga dia memiliki 4 orang anak dan seorang istri.

B. SM

SM adalah seorang Kepala Dusun di Desa Buangin. Lahir pada tanggal 05 September 1968, tempat tinggal SM di Desa Buangin Dusun Pondan, SM beragama Islam, pendidikan Terakhir SLTA. SM juga berprofesi sebagai petani dan wiraswasta.

C. EW

EW adalah Kepala Dusun di Desa Buangin. Lahir pada tanggal 04 Oktober 1969, tempat tinggal EW di Desa Buangin Dusun Tarue, EW beragama islam, pendidikan terakhir SLTA. EW Berprofesi sebagai Wiraswasta. Memiliki 4 orang anak dan seorang istri.

D. HJ

HJ adalah Tokoh Pemuda di Desa Buangin. Lahir Pada tanggal 1 Desember 1973. Tempat tinggal HJ di Desa Tarue Dusun tarue. EW beragama Islam. Pendidikan terakhir SLTA. HJ berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil). Memiliki 3 orang anak dan seorang istri.

E. AF

AF adalah Tokoh Perempuan di Desa Buangin. Lahir pada tanggal 30 Desember 1963. Tempat tinggal AF di Desa Buangin Dusun Tarue. AF beragama islam. Pendidikan Terakhir SLTA. AF juga berprofesi sebagai

Staf pegawaidi Kantor Desa Buangin. Memiliki 3 Orang anak dan seorang suami.

F. DP

DP adalah Kepala Desa di Desa Dandang. Lahir di Dandang, 14 februari 1961. Tempat tinggal di Desa Dandang Dusun Dandang I. DP beragama Islam. Pendidikan Terakhir SMP. DP juga sebagai pengusaha . memiliki 7 orang anak dan seorang istri.

G. HY

HY adalah Kepala Dusun di Desa dandang. Lahir pada tanggal 20 Maret 1976. HY Tinggal Di Desa Dandang dusun Dandang I. Beragama Islam. Pendidikan terakhir SLTA. HY juga seorang wiraswasta. Memiliki 3 orang anak dan seorang istri

H. AW

AW adalah seorang kepala Dysyn Desa Dandang. Lahir pada tanggal 5 januari 1977. AW tinggal di Desa Dandang Dusun Dandang I. Beragama islam. Pendidikan terakhir SLTA. AW beragama islam. AW juga berprofesi sebagai wiraswasta. Memiliki 1 orang anak dan seorang istri.

I. AP

AP adalah Tokoh Pemudah Di Desa Dandang. Lahir pada Tanggal 03 Maret 1982. APtinggal di Desa Dandang DusunDandang II. AP Beragama islam. Pendidikan terakhir SLTA. AP juga berprofesi sebagai Guru di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Desa Dandang.

J. AJ

AJ adalah anggota kepolisian bagian reserse kecamatan sabbang. Lahir pada Tanggal 10 Februari 1984. AJ Tingal di Desa Sabbang. AJ beragama islam. Pendidikan Terakhir S1 Hukum. Memiliki 1 orang anak dan seorang istri.

K. JJ

JJ adalah Bapak Camat Kecaman Sabbang. Lahir pada Tanggal 15 Juli 1970. JJ tinggal di Masamba Kelurahan Kappuna. JJ Beragama Islam. Pendidikan terakhir S2. Memiliki 3 orang anak dan seorang istri.

4.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Antar Kelompok Pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang

Awal mula terjadinya konflik antar kelompok Pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang Itu berawal sekitar tahun 1990 sampai Tahun 2012. Akan tetapi awal mula penyebab terjadinya konflik tersebut kurang jelas. Hanya sebatas kenakalan remaja, sehingga perkelahian tak terindahkan. Hanya karena dipengaruhi oleh minuman keras, hingga dendam sehingga kerap terjadi perkelahian antar pemuda yang berujung terjadinya konflik. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pemuda di desa Buangin dan Desa Dandang, yang mana dipiju oleh Dendam lama yang berkelanjutan

tanpa ada tahap-tahap penyelesaiannya sehingga mengakibatkan masalah tersebut semakin berkelanjutan.

Konflik yang terjadi antara Desa Buangin dan Desa Dandang adalah konflik antar pemuda , karena konflik tersebut menjadi besar sehingga melibatkan para orang tua di Desa tersebut. Awalnya orang tua tidak ada yang ikut tapi karena konfliknya sudah besar akhirnya para orang tua pun ikut.

Konflik ini juga terjadi karena orang tua tidak pernah memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa masyarakat di Desa Buangin maupun Desa Dandang itu masih banyak yang memiliki hubungan keluarga, karena dulunya Desa Dandang adalah bagian dari Desa Buangin.

Yang menjadi puncak terjadinya konflik adalah akhir tahun 2010 dimana konflik kembali terjadi antara desa tersebut. Yang mana terdapat berbagai korban yang terkena senjata tajam meskipun tidak ada korban jiwa pada konflik tersebut, akan tetapi dari konflik yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai macam kerugian bagi masyarakat sipil .

Secara umum sumber atau penyebab terjadinya konflik yaitu :

- 1) Konflik Nilai. Kebanyakan konflik yang terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Katakan nilai itu sesuatu yang prinsip, dan prinsip itu tidak boleh dilanggar. Konflik terjadi, karena dua pihak

memberikan nilai yang berbeda atas apa yang menjadi objek konflik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah konflik yang bersumber dari perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideology atas apa yang diperebutkan.

- 2) Kurangnya komunikasi. Jangan menganggap sepele komunikasi antar manusia, karena konflik bisa terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka (fungsi komunikasi, antara lain adalah mengurangi tingkat ketidakpastian) dapat mengakibatkan konflik. Keadaan ini mendorong dua pihak menjadi cemas, mungkin pula takut sehingga mulai bertanya : dia atau saya yang harus lebih dahulu berkomunikasi. Yang masuk dalam kategori ini adalah konflik makna informasi. Artinya, dua pihak atau lebih member makna yang berbeda secara diametral atas suatu informasi tentang apa yang menjadi sasaran konflik.
- 3) Kepemimpinan yang kurang efektif/pengambilan keputusan yang tidak adil. Jenis konflik ini sering terjadi pada organisasi atau kehidupan bersama dalam sebuah komunitas dan masyarakat.
- 4) Ketidakcocokan Peran. Konflik ini bisa terjadi dimana dan kapan saja, asal dalam sebuah organisasi (sosial maupun formal).

Ketidakcocokan peran itu terjadi karena dua pihak mempersepsikan secara sangat berbeda peran mereka masing-masing. Ada dua kelompok P dan Q yang sedang beradab dalam situasi konflik. P dan Q mengklaim bahwa peran X adalah peran P atau Q (saling melempar tanggung jawab). Dengan tidak adanya peran itulah terjadi konflik, sehingga kebersamaan dalam organisasi atau kelompok masyarakat itu menjadi tidak bermakna, tugas dan fungsi organisasi tidak berjalan, dan seterusnya.

- 5) Konflik yang belum terpecahkan. Banyak pula konflik yang terjadi karena ada konflik di antara dua pihak yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Tidak ada proses “saling memaafkan” dan “saling mengampuni”. Keadaan ini seperti api dalam sekam, yang setiap saat bisa timbul dan menghasilkan konflik lebih besar.

Seperti halnya konflik yang terjadi antara Desa Buangin dan Desa Dandang. Dari hasil penelitian lapangan, menunjukkkan bahwa terdapat berbagai macam alasan penyebab sehingga terjadilah konflik antar pemuda dikedua desa tersebut . Berikut penyebab terjadinya konflik antara Desa Buangin dan Desa Dandang yang diungkapkan oleh informan diantaranya yaitu :

- Kurangnya lapangan kerja dan Masalah Minuman Keras
- Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan.
- Faktor kesenjangan Sosial
- Faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi Ketersinggungan.
- Karena adanya Profokator

Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar Pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang diantaranya yaitu:

A. Kurangnya lapangan pekerjaan dan Masalah Minuman Keras

Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat di Desa Buangin dengan Desa Dandang kurang aktifitas, karena kurangnya aktifitas para pemuda sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan melakukan kegiatan minum-minuman keras. Ini merupakan salah satu alasan sehingga kerap terjadi perkelahian antara pemuda sehingga dari perkelahian tersebut menjadi sebuah konflik yang besar. Dari semua informan yang didapatkan di lapangan menganggap bahwa kurangnya lapangan pekerjaanlah sehingga sering terjadi konflik. Seperti penuturan dari informan di antaranya :

EW (46 Tahun) :

“ kurangnya lapangan pekerjaan di luwu utara ini mie juga yang memicu terjadinya konflik karena berkurangnya aktifitas masyarakat sehingga mereka biasanya banyak mengonsumsi minuman keras yang bisa membuat mereka tidak sadar sehingga mereka biasanya mengganggu orang yang melintas di daerah tersebut”(wawancara 12 Januari 2014)

AW (45 Tahun)

“ Karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran begitu banyak. Karena tidak adanya pekerjaan, sehingga aktifitas anak muda hanya mengonsumsi minuman keras, Habis minum mereka kesana kemari sehingga terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan perkelahian yang berujung pada konflik.

Hal ini di benarkan oleh WK (53 Tahun)

“ salah satu pemicu terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan kerja yang ada di Kab. Luwu Utara yang membuat masyarakat kurang aktifitas, yang mana pemuda-pemuda hanya bisa mengonsumsi minuman keras ”(wawancara, 16 Januari 2014).

B. Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan

Berdasarkan hasil dari informan yang di dapatkan melalui informan faktor kedua yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu karena adanya konflik yang belum terselesaikan . Seperti penuturan HY

“Karena adanya masalah yang belum terselesaikan, sehingga besok-besok atau kapan, konflik tersebut bakalan muncul lagi” (wawancara 14 Januari 2014)

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh JJ

“Konflik tersebut biasanya muncul karena kemungkinan adanya masalah-masalah yang belum terselesaikan, atau di ketahui oleh pihak-pihak tertentu, dari situlah dapat memicu

**timbulkan konflik antar pemuda di desa tersebut”.
(Wawancara, 20 Januari 2014)**

C. Faktor Ketidak Cocokan Peran dan kesenjangan Sosial

Kemudia penyebab selanjutnya yaitu fakitor Ketidak cocokan peran dan kesenjangan sosial. Yang mana konflik ini terjadi karena adanya ketidak cocokan peran antara masyarakat desa Buangin dan Desa Dandang sehingga terjadilah kesenjangan sosial. Hal ini melibatkan para tokoh yang ada di desa Buangin dan Desa Dandang. Seperti yang dituturkan oleh HJ (40 Tahun)

“Salah satu faktornya itu karena Masalah kesenjangan sosial yang mana hal tersebut melibatkan para tokoh yang ada di desa Buangin dan Desa dandang”. (Wawancara 12 Januari 2014)

Kemudian di tambahkan lagi oleh AF (51 Tahun)

“Karena adanya kesenjangan sosial, maka terjadilah konflik antara Desa Buangin dan Desa Dandang. Tidak adanya kecocokan peranan sehingga hal tersebut melibatkan para Tokoh yang ada di Desa buangin dan Desa Dandang, sehingga merambat ke pemuda”. (Wawancara, 15 Januari 2014)

D. Faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi Ketersinggungan.

Berdasarkan dari Informan, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara desa Buangin dan Desa Dandang adalah karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga menimbulkan ketersinggungan. Hal ini kerap dialami para pemuda setempat. Seperti yang dikatakan oleh AP (32 Tahun)

“Anak muda sekarang itu cepat sekali tersinggung, karena tidak baiknya komunikasi di antara mereka sehingga menimbulkan prasangka, dan mengakibatkan ketersinggungan”. (Wawancara 16 Januari 2014).

Hal tersebut di benarkan oleh JJ

“Bahwa karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemuda di Desa Buangin dan pemuda di Desa Dandang, maka kerap terjadi Konflik. Ketersinggungan salah satu bukti bahwa komunikasi di antara mereka itu kurang baik. Dari hal itulah sehingga kerap menimbulkan perkelahian dan berujung pada konflik yang melibatkan para pemuda-pemuda setempat”. (Wawancara, 20 Januari 2014)

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antara kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antara warga, khususnya anak muda yang mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama.

Kemudian dijelaskan oleh beberapa sosiolog mengenai akar penyebab konflik secara lebih luas dan terperinci. Mereka berpendapat bahwa beberapa hal yang lebih mempertegas akar dari timbulnya konflik diantaranya :

1. Perbedaan antar-individu: di antaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

2. Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi ataupun politik.
Benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh makin bebasnya berusaha, sehingga banyak diantara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya. Adapun benturan kepentingan politik lihat lagi konflik kepentingan.
3. Perubahan sosial, yang terjadi secara mendadak biasanya menimbulkan kerawanan konflik. Konflik dipicu oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak biasanya diwarnai oleh gejala dimana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Keadaan demikian ini, memicu banyak orang bertindak yang berakibat pada benturan antar kepentingan baik secara individual maupun kelompok.
4. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan ini group dan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik, ideal, beradab di antara kelompok lain. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap

demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Bab 2 Pasal 5 Konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Adapun penganut teori konflik menjabarkan bahwa penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan atau ketimpangan hubungan dalam masyarakat yang memunculkan diferensiasi kepentingan. Menurut Turner ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, di antaranya :

1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya yang sangat terbatas didalam masyarakat.
2. Ditariknya lagi legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah.
3. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan.

4. Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah serta lambatnya mobilitas kelas atas.
5. Melemahnya kekuasaan Negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah oleh elite.
6. Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideology radikal.

E. Karena adanya Profokator

Menurut HY :

“Perkelahian antar pemuda disini itu diakibatkan oleh beberapa elemen dari luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor Luar yang bisa memicu perkelahian kemudian berujung menjadi konflik itu terjadi. Dalam artian masalah ini ada bisa saja terjadi karena adanya pihak ke 3 atau PROFOKATOR” (Wawancara Tanggal 14 januari 2014).

Akan tetapi ditegaskan kembali oleh pemerintah kecamatan, sebut saja JJ, bahwasannya :

“Isunya memang seperti itu, bahwa ada oarng luar yang menjadi profokator atau dalang dari masalah konflik yang terjadi, akan tetapi saya tidak bisa mengatakan seperti itu kalau tidak ada bukti. Akan tetapi di inyisalir bahwa kemungkinan ada, akan tetapi cuman hanya sebatas kemungkinan. Polisi saja belum bisa mengungkapkan ada atau tidaknya, jadi susah kalau tidak ada bukti”. (wawancara, Tanggal 20 januari 2014)

Begitu pula dari pemerintah Desa menegaskan bahwa

“Disisi lain, konflik ini muncul kembali karena adanya profokator. Akan tetapi karena kurangnya bukti, jadi hal tersebut hanya dijadikan sebagai isu belaka, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa memang ada”. (wawancara 16 Januari dan 17 januari 2014).

Dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa, setiap masalah seperti konflik yang terjadi di Desa Bungin dan Desa Dandang tak luput dari orang-orang yang menjadi pihak ketiga dalam artian sebagai profokator. Akan tetapi sebelum adanya bukti yang sesuai, maka benar yang dikatakan oleh salah seorang informan bahwa, kita tidak boleh mengatakan bahwa ada profokator dibalik konflik yang terjadi sebelum adanya bukti yang kuat.

Apabila kita berbicara masalah politik, apakah ada atau tidaknya dalam konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang, karena berbicara masalah faktor politik yang biasanya kerap muncul disaat ada masalah seperti konflik, maka itu tak luput dari campur tangan dari pihak-pihak yang terkait. Seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Buangin dan Desa Dandang, menurut dari beberapa informan mengatakan bahwa, hal tersebut tidak di pungkiri bahwa faktor politik itu ada. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan AF (51 Tahun)

“Bahwasanya tidak dipungkiri bahwa ada faktor politik dalam konflik yang terjadi antara Desa buangin dan Desa Dandang, yang mana mereka muncul setelah sekian lama konflik ini ada. Faktor politik itu ada datangnya belakangan. Pas terjadi konflik mereka muncul seolah-olah menjadi penengah, akan tetapi bisa saja mereka muncul sebagai penengah atau orang yang mampu mendamaikan bisa juga sebagai perusak, dalam hal ini sebagai Profokator”. (Wawancara Tanggal 15 Januari 2014)

“Jangan sampai kita berfikir bahwa, konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang ini di picu

karena faktor politik, itu tidak benar, karena disini konflik ini murni terjadi diluar karena masalah politik”.
(JJ, Wawancara Tanggal 20 Januari 2014)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, ternyata faktor politik bukanlah salah satu pemicu terjadinya konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang, akan tetapi faktor politik itu tidak dipungkiri bahwa ada, akan tetapi hanya sebatas mencari kepentingan sendiri.

4.4. Upaya Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 BAB III Pasal 6 Mengenai Pencegahan Konflik dilakukan dengan Upaya :

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. Meredam potensi Konflik; dan
 - d. Membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan JJ

Posisi saya dalam konflik ini saya tidak mendukung salah satu dari pihak yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah satu dari pihak yang berkonflik agar mereka menuruti kata-kata saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mendamaikan

masalah ini ya saya lakukan. Tugas saya sebagai Camat dan aparat pemerintah Di kecamatan sabbang ini memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan perkara ini agar tidak berkelanjutan. (wawancara Tanggal 20 Januari 2014)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi pemerintah Kecamatan dalam menangani permasalahan ini netral tapi lemah dalam menghadapi permasalahan ini karena dari pihak Pemerintah tidak pernah ingin mencari tau apa permasalahan yang sebenarnya dan kronologi dari permasalahan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kedua desa yang berkonflik dibantu oleh tokoh masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara adat seperti melakukan pemotongan kerbau.

Seperti Yang diungkapkan Oleh Kepala Desa Buangin Dan Desa Dandang.

“ Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda dengan pemotongan kerbau di tempat kejadian dimana tempat mereka berkelahi”. (JP. Wawancara Tanggal 17 Januari 2014).

“Setiap kita adakan perdamaian, kita potongkan kerbau, sebagai tanda bahwa pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berdamai”. (WK. wawancara Tanggal 16 Januari 2014).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah kecamatan, pemerintah Desa dandang dan pemerintah Desa Buangin beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, yang mana mampu meredah munculnya kembali konflik. Terbukti setelah beberapa kali mereka berdamai, akan tetapi mereka kembali berkonflik.

Seperti penuturan dari salah satu informan penulis, bahwasannya

“Pemerintah memang sudah melakukan perdamaian, akan tetapi pemerintah tidak benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Kalau hanya sekedar pemotongan kerbau saja, itu hanya sebatas formalitas, toh buktinya konflik kembali terjadi”. (HY. Wawancara Tanggal 14 Januari 2014)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan penulis lagi, bahwasannya :

“Kinerja pemerintah belum sepenuhnya sempurna, masa melakukan perdamaian akan tetapi pemuda yang berkonflik tidak dihadirkan, bagaimana ceritanya mau berdamai. Masa yang mau didamaikan itu orang-orang yang tidak berkonflik, kan aneh.”. (HJ. Wawancara 12 Januari 2014)

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti bahwa pemuda desa Buangin dan Desa Dandang masih saja terus berkonflik.

Secara umum ada tiga macam bentuk pengendalian bentuk pengendalian konflik sosial

a. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai.

b. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”.

c. Arbitrasi

Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak

ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka

Upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kecamatan sabbang beserta pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang Yaitu, Melakukan Mediasi, Negosiasi, dan Memfasilitasi para pemuda yang terlibat konflik.

Hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan :

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Kita memediasi para pemuda pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah kedua desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman seperti sedia kala”. (JJ. wawancara Tanggal 20 Januari 2014)

Hasil wawancara dengan pemerintah desa :

“kita memediasi para pemuda. Kita cari tau apa permasalahan yang sebenarnya. Kita memfasilitasi, dan kita melakukan negosiasi agar para pemuda bisa terbuka” (DP. Wawancara Tanggal 17 Januari 2014)

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan perdamaian adalah kita memediasi para pemuda, di bantu dengan pemerintah desa Dandang dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”.(WK. Wawancara Tanggal 16 Januari 2014)

Hasil wawancara dengan Pihak kepolisian:

“awal mula kejadian konflik kami genjar untuk mencari pelaku utama, kami menyisir daerah-daerah yang kami anggap sebagai tempat persembunyian para pelaku konflik. Kami menyisiri

daerah gunung, hutan, serta perkebunan masyarakat setempat”.
(AJ. Wawancara Tanggal 22 Januari 2014)

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sabbang beserta pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang di bantu Oleh para Tokoh masyarakat beserta pihak Kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya sering berkonflik, kini sekarang sudah berangsur-angsur aman. Ini semua tak lepas dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang dikatan oleh beberapa informan yang penulis temui .

“Alhamdulillah sekarang daerah kami sdah mulai aman. Ini semua tak luput dari kerja keras para pemerintah dibantu dengan aparat kepolisian yang gigih untk menyelesaikan permasalahan ini.” (HY. Wawancara Tanggal 14 Januari 2014)

“sekarang sudah aman, dibanding dengan yang dulu-dulu, keluar rumah saja kita takut, tapi karena pemerintah sudah cukup serius walaupun awalnya kita menganggap bahwa pemerintah tidak begitu serius menangani masalah ini, alhasil aman mi tawwa”. (AW. Wawancara Tanggal 14 januari 2014)

Dari hasil wawancara diatas, bahwasannya daerah yang dulunya dapat dikatakan sebagai daerah yang sering berkonflik, kini sudah mulai

berangsur-angsur aman. Ini semua tak lepas dari peran pemerintah kecamatan, Pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta kepolisian yang telah gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

4.5. Peranan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Antar kelompok

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai negosiator, mediator dan fasilitator.

A. Peran pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Mediasi

Peranan pemerintah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyakbanyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun

tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius.

“Kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah di bantu dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian.” (DP wawancara tanggal 17 Januari 2014)

Dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar kelompok pemuda dari desa Buangin dan Desa Dandang .penulis fikir, ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan oleh npemerintah dalam menangani masalah tersebut.

B. Peran Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa dalam Melakukan Fasilitasi

peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas),

menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).

Campur tangan pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok pemuda ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah dari kedua desa yang bertikai memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten beserta kepolisian untuk melakukan pertemuan dengan pelaku konflik.

“Pemerintah dari desa buangin dan desa dandang memfasilitasi kami dalam hal melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan para pelaku konflik, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda .

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah desa Buangin dan desa Dandang memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah desa demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

C. Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Negosiasi

Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti

mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan.

Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan *lobbying*. Dalam proses Negosiasi *Lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata lobby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

Menurut JJ

“ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada para pemuda pelaku konflik”. (Wawancara Tanggal 20 Januari 2014)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa Melakukan negosiasi apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang di ambil oleh pemerintah .

D. Peran pihak Kepolisian dalam Mengatasi Konflik yang terjadi antar Kelompok pemuda desa Buangin dan desa Dandang

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas

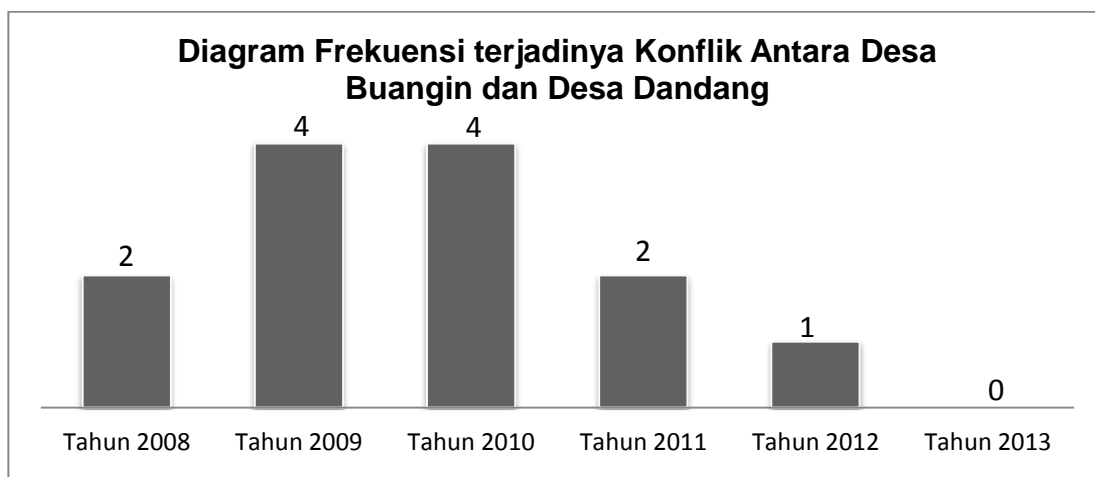
pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat. UU ini juga lebih mengedepankan penanganan konflik bukan hanya melalui pendekatan keamanan namun lebih jauh melalui pendekatan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh kepentingan yang dimulai dari tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

“Kami dari pihak kepolisian, dibantu oleh brimob turun langsung ke tempat kejadian perkara. Kami berusaha untuk menjadi penengah didalam konflik tersebut. Kami tidak membandingkan di antara kedua kelompok, kami memberi tembakan peringatan, akan tetapi masih saja mereka terus berkelahi. Kami memiliki tanggung jawab dalam hal ini sebagai pihak keamanan, kami akan berusaha sekuat tenaga agar perkelahian tersebut segera terselesaikan, apapun itu caranya kami dari pihak kepolisian akan siap. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.” (AJ.Wawancara Taggal 22 Januari 2014)

Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pada tahap penghentian melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Sementara pada tahap pasca konflik melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, dengan mendasarkan kepada UU No 7 Tahun 2012 Presiden RI mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013. Sejatinya Inpres itu bermaksud untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu, terpadu antar dan instansi terkait.

4.6. Frekuensi Terjadinya Konflik



Sumber : Wawancara DP, Selasa 11 Maret 2014

Keterangan :

Tahun 2008 : Konflik terjadi sejumlah 2 kali

Tahun 2009 : Konflik terjadi sejumlah 4 kali

Tahun 2010 : Konflik terjadi sejumlah 4 kali

Tahun 2011 : konflik terjadi sejumlah 2 kali

Tahun 2012 : Konflik terjadi sejumlah 1 kali

Tahun 2013 : Konflik tidak terjadi

Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa frekuensi terjadinya konflik antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang dari tahun 2008 sampai pada tahun 2013 terjadi peningkatan dan penurunan terjadinya konflik. Pada Tahun 2008 konflik terjadi sekitar 2 kali, kemudian pada tahun 2009 terjadi peningkatan hingga 4 kali terjadinya konflik, kemudian pada tahun 2010 konflik masi terus terjadi hingga 4 kali, pada tahun 2011 terjadi penurunan, konflik terjadi sekitar 2 kali, kemudian pada tahun 2012 kembali terjadi penurunan, konflik terjadi sekitar 1 kali, kemudian pada tahun 2013 kembali terjadi penurunan hingga konflik tidak terjadi. Artinya pada tahun 2008 sampai tahun 2010 penanganan konflik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dapat dikatakan gagal, kemudian pada tahun 2011-2013 terjadi penurunan terjadinya konflik, artinya pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa berhasil menyelesaikan konflik tersebut secara sedikit demi sedikit.

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Dandang, DP pada hari selasa 11 Maret 2014.

“Konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang sudah sangat lama, dan kemudian penanganannya pun juga berfariatif. Kita lihat saja konflik yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2013. Pada tahun 2008 sampai 2010 merupakan puncak terjadinya konflik, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2008 sampai 2010 konflik terjadi mencapai 100%, kemudian pada tahun 2011 sampai 2013 terjadi penurunan hingga mencapai 70%”.

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara Desa Buangin dan Desa Dandang dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami penurunan. Artinya penanganan konflik oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dari tahun 2008 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sehingga pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam hal penanganan konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang.

4.7. Faktor penghambat

Dalam menangani masalah Konflik yang terjadi antar kelompok pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang begitu banyak hambatan yang menjadi masalah buat pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Diantara nya yaitu :

1. Kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pemuda-pemuda kedua desa tersebut sehingga para pemuda tidak pernah menghiraukan apa yang dikatakan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Menurut Pemerintah Kecamatan.

“Kendala awalnya yaitu adanya ketakutan para pemuda di daerah konflik untuk bertemu dengan pemerintah kecamatan dan pihak keamanan. Karena seolah-olah mereka merasa bukan bagian dari pemerintah, dan pemerintah juga bukan bagian dari mereka”. (JJ. Wawancara Tanggal 20 Januari 2014).

Dari Wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah kurang melakukan pendekatan dengan para pemuda, sehingga pemuda merasa bukan bagian dari pemerintah. Karena anggapan banyak orang bahwa pemuda di sekitar desa Buangin dan Desa Dandang itu nakal. kemudian dari anggapan itulah sehingga para pemuda setempat kurang disentuh oleh pemerintah.

“permasalahan yang besar yang kita hadapi saat ini yaitu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Seandainya kesadaran itu ada pada masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda, yakin bahwa hal seperti ini tidak bakalan terjadi. Kita akan hidup tentram, damai. Tidak ada perkelahian dimana-mana”.

Dari wawancara diatas, sudah jelas bahwa, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya para pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut, sehingga perkelahian serin kali terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ketakutan dari konflik yang timbul di masyarakat adalah ketika konflik tersebut berjalan serupa spiral konflik yang tak berhenti. Pertikaian antar kelompok yang dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan konflik yang sangat gampang untuk terulang ditempat yang sama. Pada uraian BAB sebelumnya banyak faktor yang diutarakan yang kemudian menjadi faktor simultansi perkelahian yang berujung konflik tersebut.

Sesungguhnya dibalik berulangnya tindak kekerasan seperti perkelahian antar kelompok pemuda yang burujung konflik tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita.

Pemerintah kecamatan Sabbang beserta Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakatnya ternyata belum dapat menemukan solusi yang tepat dalam menangani perkelahian antar kelompok pemuda yang berujung pada konflik. Sudah beberpa kali para pelaku konflik ini didamaikan, akan tetapi konflik tersebut muncul kembali. Solusi kemudian tidak menyentuh lingkungan

pelaku utama tapi masih bersifat personal dan cenderung lebih sulit untuk dikontrol pelaksanaannya.

Kecamatan sabbang menjadi salah satu ikon perkelahian antar kelompok pemuda di kabupaten luwu utara dan pemerintah setempat setidaknya tidak lagi menerapkan cara penanggulangan yang bersifat personal. Namun melihat konflik antar kelompok sebagai buah sosial yang menyimpang. Pemerintah kabupaten luwu utara bekerjasama dengan pemerintah kecamatan Sabbang beserta pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang serta pihak kepolisian mengupayakan beberapa cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah kecamatan Sabbang bekerjasama dengan pemerintah Desa Buangin dan Desa Sabbang beserta Tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Langkah yang mereka tempuh yaitu dengan memediasi, dan memfasilitasi para pemuda pelaku konflik untuk melakukan perdamaian.

Dalam analisis penulis pada bab sebelumnya ditemukan beberapa program yang tidak maksimal karena hanya bersifat seremonial dan bersifat personal, sebenarnya tindakan perdamaian sudah benar, akan tetapi tidak mencapai sasaran. Salah satunya yaitu melakukan perdamaian dengan melakukan pemotonagan kerbau. Yang salah dari sini menurut penulis bahwa melakukan perdamaian akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-piihak

atau pemuda yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang hadir hanyalah pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kepolisian, beserta para undangan lainnya.

Akan tetapi berkat kegigihan dari masing-masing pihak, baik dari pemerintah Kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, beserta kepolisian berhasil menangani sedikit demi sedikit konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang sehingga daerah tersebut kembali kondusif.

Walaupun sebenarnya juga, pemerintah yang terkait terlihat menunggu persoalan mebesar untuk kemudian ditangani dengan cara yang pasti bersifat represif karena desakan kejadian.

5.2. Saran

Terkait mengenai resolusi konflik dari kejadian yang sedang berlangsung, maka penulis mengikutkan beberapa solusi dari penelusuran pustaka dan beberapa pengalaman resolusi konflik di beberapa tempat di Indonesia yang pertama yaitu :

1. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai.

2. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”.

3. Arbitrasi

Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka

Walaupun konflik telah berhasil diselesaikan ketika sebuah kejadian telah berlangsung, namun dalam analisa penuis konflik bermunculan dengan dipenuhinya beberapa faktor yang disebutkan pada BAB sebelumnya. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut kiranya diretas dengan solusi tanpa harus

menyentuh langsung konflik yang sedang terjadi karena secara tidak langsung itu telah menyentuh persoalan mendasar dari konflik.

Konflik bisa diretas dengan menangani persoalan masalah lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Pemerintah mampu menangani masalah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak member peluang bagi generasi muda untuk berkarya..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Ejournal. Pin. Or. Id/site/2p;633

Cohen Bruce J; tanpa tahun, *Sosiologi Suatu Pengantar*, penerbit Rineka Cipta.

Faisal, Sanafiah. 2001. *Fomat-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajawaliPres

Hendricks, William. 2006. *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif)*. Jakarta : Bumi Aksara

Inis. 2003. *Konflik Komunal Indonesia Saat Ini*. Jakarta : Leiden

Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Edisi kedua. 1989

Kencana, syafie Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Kencana Aditama

Kolip, Usman DKK. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Grub

Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka Dan Konflik*. Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara

Mas'oed, Mohtar, 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisi dan Teorisasi*, Universitas Gadjah Mada

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : PT. rineka Cipta

Poerwaderminta, W.L.T. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : PT. Lingkar Pena

Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah : Tugas Pokok Dan fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers

Susan, Novri. 2009. *pengantar sosiologi konflik dan isu-isu kontemporer*. Kencana: Jakarta

Tol, Roger. DKK. 2005. *Konflik Kekerasan Komunal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Yulius, Hermawan. 2007. *Transformasi Dalam studi Hubungan Internasional (Aktor, lu, dan Metedologi)*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Undang-Undang

UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri Tahun 2013

Internet

<http://iwansmile.wordpress.com/konsep-keamanan-nasional/> Di Akses Hari Senin Tanggal 30-9-2013 , Jam 11.00

<http://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik-2/> Di Akses Hari Senin, Tanggal 30-9-2013, jam 10.58

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/24/akar-konflik-sosial-komunal-di-makassar-487737.html> Di Akses Hari Rabu, Tanggal 25-9-2013, Jam 09.00

<http://andrie07.wordpress.com/2009/11/25/faktor-penyebab-konflik-dan-strategi-penyelesaian-konflik/> Di Akses Hari Rabu, Tanggal 25-9-2013 Jam 09.25

<http://febriirawanto.blogspot.com/2011/02/pengertian-bentuk-faktor-dan-dampak.html#comment-form> Di Akses Hari Rabu, Tanggal 25-9-2013 Jam 09.42

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> Diakses Hari Rabu, Tanggal 26-10-2013 Jam 10.20

